



Inovasi Model Harvard Gender Untuk Mitigasi KARHUTLA Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Analisis Dari Tingkat Stakeholder Hingga Tapak di Kota Palangka Raya

Juli Natalia Silalahi^{1)*}, Osi Karina Saragih²⁾, Anisa Pebrianti³⁾, Mahmudin Sirait⁴⁾

Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

[^{1\)}julinataliasilalahi12@fisip.upr.ac.id](mailto:julinataliasilalahi12@fisip.upr.ac.id)

[^{2\)}osikarinasaragih@fisip.upr.ac.id](mailto:osikarinasaragih@fisip.upr.ac.id)

[^{3\)}pebriantianisa@fisip.upr.ac.id](mailto:pebriantianisa@fisip.upr.ac.id)

[^{4\)}mahmuddin.sirait@fisip.upr.ac.id](mailto:mahmuddin.sirait@fisip.upr.ac.id)

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan dari tingkat pemangku kepentingan hingga tingkat lokal menggunakan perspektif gender, dan untuk menguji inklusivitas kebijakan tersebut terhadap perempuan dan kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Analisis menerapkan Kerangka Kerja Analitik Gender Harvard untuk memetakan peran, akses, dan kontrol berbasis gender, dilengkapi dengan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe untuk menguji relasi kekuasaan dan praktik eksklusif dalam kebijakan mitigasi kebakaran. Informan meliputi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya. Temuan menunjukkan bahwa mitigasi kebakaran hutan dan lahan masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan netral gender. Laki-laki cenderung mendominasi aktivitas teknis dan proses pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih terlibat dalam peran domestik, sosial, dan ekonomi pendukung. Meskipun perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan sosial-ekologis, kontribusi ini tidak diakui secara formal dalam struktur kebijakan dan kelembagaan. Analisis demokrasi agonistik mengungkapkan bahwa kondisi ini dibentuk oleh relasi kekuasaan dan hegemoni kebijakan yang membatasi artikulasi politik perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan mitigasi kebakaran berkelanjutan membutuhkan integrasi kapasitas teknis, pemberdayaan sosial, dan pengakuan kepentingan yang saling bertentangan sebagai bagian inheren dari tata kelola demokratis. Model Gender Harvard terintegrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka kerja potensial untuk mempromosikan kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci: Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan, Gender, Kerangka Gender Harvard, Demokrasi Agonistik, Kebijakan Lingkungan

Abstract

This research employs a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews, observation, and document analysis as data collection techniques. The analysis applies the Harvard Gender Analytical Framework to map gender-based roles, access, and control, complemented by Chantal Mouffe's agonistic democracy theory to examine power relations and exclusionary practices within fire mitigation policies. The informants include government institutions, civil society organizations, and local communities in Kereng Bangkirai Village, Palangka Raya City. The findings indicate that forest and land fire mitigation remains dominated by a technocratic and gender-neutral approach. Men tend to dominate technical activities and decision-making processes, while women are more involved in domestic, social, and supporting economic

roles. Although women make significant contributions to social-ecological resilience, these contributions are not formally recognized within policy and institutional structures. The agonistic democracy analysis reveals that this condition is shaped by power relations and policy hegemonies that limit women's political articulation. This study concludes that strengthening sustainable fire mitigation requires the integration of technical capacity, social empowerment, and the recognition of conflicting interests as an inherent part of democratic governance. The integrated Harvard Gender Model developed in this research offers a potential framework for promoting more inclusive, equitable, and sustainable forest and land fire mitigation policies at the local level.

Keyword: Forest And Land Fire Mitigation, Gender, Harvard Gender Framework, Agonistic Democracy, Environmental Policy

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki status *High Risk* terkait Karhutla. Secara keseluruhan luas area yang terbakar pada tahun 2023 berkisar 165.896 Ha dan Wilayah yang kerap mengalami kerentanan terbesar berada pada wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (Pantau Gambut, 2023). Fakta menarik dari Kota Palangka Raya, dimana Kota tersebut selama 3 tahun berturut-turut (2020, 2021, 2022) mempunyai kemampuan untuk menekan angka Karhutla, tetapi ditahun 2023 terjadi Karhutla dengan area luas yang terbakar berkisar 3.892 Ha (WWF INDONESIA; PPIG UNIVERSITAS PALANGKA RAYA, 2024). Fakta lain yang menegaskan bahwa terdapat tujuh wilayah di Kota Palangka Raya yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan dan konsisten mengalami hotspot saat musim kemarau, yaitu Kelurahan Menteng (Kecamatan Pahandut), Kelurahan Bukit Tunggal dan Petuk Ketimpun (Kecamatan Jekan Raya), Kecamatan Tangkiling, Kelurahan Marang, Kalampangan, dan Kereng Bengkirai. Ketujuh wilayah ini dinyatakan oleh Koordinator Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) sebagai lokasi yang secara rutin mengalami titik panas (Antara News, 2023). Data tersebut didukung dengan fakta ditahun 2024, tercatat 97 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya dengan total luasan mencapai 30,81 hektare, di mana 66 kejadian di antaranya terjadi di Kecamatan Jekan Raya, menjadikan wilayah ini sebagai kawasan paling terdampak dalam lingkup kota (Antara News, 2024).

Ditinjau dari permasalahan diatas, UU No.23 Tahun 2014 menyatakan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan, Pencegahan, Penanganan, dan Penanggulangan pasca Karhutla di wilayahnya, (Undang-undang (UU) TENTANG Pemerintahan Daerah, 2014). Serta UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang kuat untuk berperan aktif dalam pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan yang tertuang dalam RPJMDes atau APBDes yang diaplikasikan dalam bentuk program Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan pasca Karhutla, kemudian Desa memiliki otonomi penuh untuk membuat Peraturan Desa terkait mekanisme penggunaan api dalam aktivitas masyarakat. Dari penjelasan diatas, menyatakan bahwa Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintahan Desa yang paling implementatif untuk menurunkan angka karhutla (Undang-Undang Tentang Desa, 2014)

Namun, keberhasilan program Mitigasi Bencana di tingkat Tapak, bergantung pada partisipasi masyarakat lokal (Ananda et al., 2022). Hal yang urgensial adalah apakah program yang dihasilkan oleh Tingkat Stakeholder responsive gender dan memastikan bahwa program tersebut telah mencakup kebutuhan masyarakat dan kelompok rentan yang tercermin dalam kebijakan Pemerintah (Global Disability Innovation Hub, 2022). Padahal, integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam proyek mitigasi bencana dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan memastikan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat (Kemenkeu; NDA GCF; GGGI, 2021). Laporan UNDR (2023) menekankan perlunya intervensi aktif untuk mengatasi ketidakseimbangan gender dalam pengurangan risiko bencana. Pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan perempuan dalam tata kelola risiko bencana dan iklim sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan inklusif (UN Women; UNFPA; UNDR, 2021). Melalui pengembangan Model Harvard Gender dalam Mitigasi Karhutla menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Daerah dan Desa untuk merancang kebijakan dan program

yang lebih responsif gender dan inklusif dengan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya dan kontrol dalam pengelolaan lahan dan kebakaran hutan sehingga program mitigasi karhutla dapat lebih efektif dalam menurunkan angka karhutla, mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, dan menciptakan keberlanjutan terhadap lingkungan (Sani, 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rumusan penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh *Stakeholder* terkait Mitigasi Karhutla di Kota Palangka Raya? (2) Bagaimana partisipasi masyarakat lokal khususnya perempuan dan kelompok rentan terhadap program Mitigasi Bencana agar tercipta inklusi sosial yang menyeluruh dan efektif di tingkat tapak? (3) Bagaimana pengembangan Model Harvard Gender menjadi langkah strategis untuk memperkuat kebijakan mitigasi karhutla serta mendorong keberlanjutan lingkungan yang melibatkan semua kelompok masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini diadakan di Kota Palangka Raya, lokasi ini dipilih disebabkan subjek informan yang diteliti berada di lokasi Kota Palangka Raya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD Kota Palangka Raya, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah, Masyarakat Peduli Api Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya dan Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena memberi ruang bagi peneliti untuk melakukan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013). Data dimaksud meliputi, data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke *new informan*. Wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh data meliputi : (1) untuk menganalisis kewenangan *Stakeholder* dalam hal kebijakan, (2) menganalisis tingkat *Tapak* khususnya aktivitas Rumah Tangga dengan Harvard Gender melalui pemetaan Aktivitas Produktif, Domestik dan Komunitas Sosial serta Akses dan Kontrol terkait sumber daya dan manfaat dari program Mitigasi Karhutla, (3) lalu terkait menggali lebih dalam apa kebutuhan praktik strategis serta peluang yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan program yang lebih responsif gender dan menuju inklusi sosial yang menyeluruh. Sementara itu juga digunakan data sekunder merujuk pada sumber data berupa profil desa, juga literatur review baik itu jurnal ataupun laporan yang berkaitan dengan kebakaran gambut di Kalimantan Tengah. Data-data yang telah terkumpulkan kemudian akan dianalisa, menggunakan teknik analisa data model Miles dan Huberman (Idrus, 2009) yang dikenal dengan teknik triangulasi, meliputi: (a) data direduksi, yaitu dilakukan pemilihan dan pemusatan data yang mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, (b) data disajikan/penyajian data, yaitu penyajian data dilakukan dengan bentuk pendeskripsian data sistematis data-data yang terpilah dan terpilih guna dilakukan analisis dengan teori yang relevan, (c) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses akhir namun belum final karena dilakukan verifikasi dengan informan atau pihak-pihak yang memberikan informasi terkait penelitian agar data yang disajikan dan diambil kesimpulannya dapat terkategori valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tingkat Stakeholder

1.1 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya terkait Mitigasi Karhutla di Kota Palangka Raya

Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan bahwa lembaga ini berfokus pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kegiatan utama DLH meliputi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan rambu larangan membakar, serta tindakan mitigasi seperti penyiraman lahan rawan kekeringan. Dalam pelaksanaannya, DLH berupaya melibatkan masyarakat dan pelaku usaha agar pencegahan lebih efektif. Namun, DLH

menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum atau pemberian sanksi administratif. DLH hanya berperan pada aspek persuasif dan edukatif, sementara penindakan berada di bawah kewenangan instansi lain. Kondisi ini menunjukkan adanya pembagian peran sektoral yang belum terkoordinasi secara terpadu.

Dalam pelayanan publik, DLH berusaha menampung aspirasi masyarakat, terutama terkait sarana pendukung kegiatan lingkungan. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan. Fokus utama diarahkan pada pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dalam menjaga lingkungan. Terkait perspektif gender, DLH mengakui bahwa penerapannya masih terbatas. Kebijakan yang berlaku cenderung bersifat netral gender, menggunakan istilah “setiap orang”, tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia. Akibatnya, pelaksanaan program pencegahan karhutla belum sepenuhnya inklusif.

Mekanisme sosialisasi yang dilakukan melalui undangan ke pihak kelurahan juga dinilai belum mempertimbangkan keterlibatan kelompok rentan, karena penentuan peserta diserahkan sepenuhnya kepada kelurahan tanpa panduan inklusif. Selain pencegahan, DLH memiliki program Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang dijalankan sejak 2021. Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi pascakebakaran, melalui pelatihan pembuatan pupuk cair, kompos, dan teh herbal dari tanaman lokal. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Meski demikian, DLH belum memiliki program khusus yang responsif terhadap dampak sosial dan gender akibat karhutla. Penanganan kelompok terdampak, seperti perempuan dan anak-anak, dialihkan kepada Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kelembagaan dalam isu lingkungan masih didominasi oleh aspek administratif, belum kolaboratif dan sensitif terhadap keadilan sosial serta gender. Secara keseluruhan, upaya DLH dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan, namun koordinasi lintas sektor dan perhatian terhadap kelompok rentan masih perlu diperkuat. Diperlukan strategi yang lebih inklusif dan responsif gender agar kebijakan lingkungan di Kalimantan Tengah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan efektif.

1.2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara, dinas ini memiliki fokus utama pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan, terutama dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta penguatan peran ekonomi perempuan. Dinas menilai bahwa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan berakar dari faktor ekonomi, sehingga strategi utama yang dilakukan adalah mendorong perempuan untuk berdaya secara ekonomi melalui kegiatan UMKM dan pelatihan keterampilan. Pemberdayaan ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat.

Selain itu, DP3APMPM juga menyoroti kontribusi besar perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti keterlibatan mereka sebagai kader PKK, kader keluarga berencana, dan petugas Posyandu. Meskipun peran mereka sangat penting bagi keberlangsungan layanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, ketertiban, dan sosial), namun apresiasi dan kompensasi terhadap kerja mereka masih sangat minim, misalnya hanya menerima insentif Rp100.000 per bulan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pengakuan terhadap kerja-kerja sosial perempuan, yang bersifat sukarela namun krusial bagi pembangunan masyarakat.

Dalam konteks bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dinas ini berperan terbatas pada penyediaan bantuan logistik bagi kelompok perempuan dan anak-anak, seperti pakaian, pembalut, serta kebutuhan dasar lainnya. Bahkan pernah disediakan “rumah singgah” tahun 2015 bagi warga terdampak kabut asap parah. Namun, diakui oleh pihak dinas bahwa hingga kini belum ada keterlibatan aktif perempuan dalam proses mitigasi dan penanganan bencana karhutla, karena hal itu dianggap merupakan ranah dinas lain seperti ketenteraman dan kebencanaan (seperti BPBD Kota Palangka Raya, OPD terkait, dan Kesatuan OPD). Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam konteks karhutla masih sebatas penerima

bantuan, bukan pengambil keputusan atau perencana kegiatan mitigasi.

Dalam hal mekanisme pelaporan kekerasan, dinas telah menerapkan sistem berjenjang mulai dari Posyandu → Lurah → Validasi → Dinas, yang disebut sebagai bentuk mitigasi risiko kekerasan. Namun demikian, hal ini juga memperlihatkan bahwa akses perempuan terhadap layanan perlindungan masih bersifat struktural dan birokratis, yang dapat memperlambat penanganan kasus. Selain itu, wawancara juga mengungkapkan bahwa isu gender belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat kelembagaan pemerintah. Sekretaris dinas mengakui bahwa bahkan lingkungan kerja internal dinas sendiri belum ramah perempuan, baik dari sisi infrastruktur maupun budaya kerja. Meskipun begitu, dinas sedang berupaya untuk memperkuat kebijakan responsif gender melalui pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Responsif Gender bersama DPRD dan OPD lain.

Dalam program pemberdayaan, DP3APMPM telah melaksanakan sejumlah kegiatan seperti pelatihan produksi amplang, pendampingan pembuatan NIB dan PIRT, serta penanaman madu kelulut di Bereng Bengkel. Namun, mereka menekankan bahwa tujuan utama tetap pada pencegahan kekerasan dan peningkatan kesadaran masyarakat, bukan pada aspek lingkungan seperti karhutla. Dinas lebih banyak bergerak dalam bidang edukasi dan sosialisasi ke 30 kelurahan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kesetaraan gender. Ketika dikaitkan dengan isu lingkungan dan kesehatan, misalnya hubungan antara karhutla dan stunting, pihak dinas mengakui bahwa dampak lingkungan memang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat, namun dinas ini masih berperan di level edukasi dan sosialisasi, bukan penanganan langsung.

1.3 MPA Kelurahan Kereng

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Kereng, diketahui bahwa penyebab utama kebakaran lahan di wilayah tersebut umumnya berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran oleh oknum atau puntung rokok yang dibuang sembarangan. Meskipun telah ada himbauan agar masyarakat melapor sebelum melakukan pembakaran, masih ditemukan kasus pelanggaran. MPA bersama pihak kelurahan melakukan patroli dan sosialisasi secara berkala untuk memberikan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Namun, seluruh anggota MPA saat ini berjenis kelamin laki-laki. Keterlibatan perempuan masih terbatas, umumnya hanya dalam kegiatan domestik atau membantu penyediaan logistik seperti air minum saat terjadi kebakaran. Hal ini disebabkan oleh kesibukan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan nelayan, serta belum adanya kebijakan khusus untuk melibatkan mereka dalam kegiatan pemadaman.

Program sosialisasi sering kali dihadiri laki-laki, meski beberapa ibu rumah tangga ikut serta karena rasa ingin tahu. Perempuan belum dilibatkan secara aktif dalam pertemuan strategis atau pelatihan terkait kebakaran, meskipun ada potensi untuk berperan, misalnya melalui kader PKK atau Posyandu. Dampak kebakaran dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap gangguan kesehatan seperti ISPA akibat asap. Namun, belum ada program khusus untuk pemulihan ekonomi atau sosial bagi kelompok rentan setelah kebakaran. Bantuan umumnya bersifat sementara, seperti pemberian sembako.

Dari segi koordinasi, MPA bekerja sama dengan BNF dan TSAK dalam kegiatan pemadaman dan penyediaan alat. Pendanaan sebagian besar bersumber dari BNF karena dukungan pemerintah masih terbatas. Sanksi terhadap pelaku pembakaran diserahkan kepada pihak kelurahan dan pemerintah kota, namun penegakannya masih lemah karena sulitnya menemukan pelaku langsung. Secara keseluruhan, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di Kereng sudah berjalan, namun belum sepenuhnya inklusif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Peran perempuan masih bersifat pasif dan belum diintegrasikan dalam struktur kelembagaan MPA maupun kebijakan pencegahan kebakaran.

1.4 Solidaritas Perempuan Mamut Menteng terkait Mitigasi Karhutla di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Serikat Perempuan (SP), diketahui bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk kebijakan lingkungan, masih sangat terbatas. SP menilai bahwa perempuan belum

memiliki ruang partisipasi yang nyata dalam penyusunan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, program pemerintah sering kali tidak mempertimbangkan pengetahuan lokal dan praktik ekologis masyarakat, seperti sistem perladangan tradisional *Manunggal* yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan masyarakat setempat.

SP menyoroti bahwa masuknya investasi perkebunan kelapa sawit membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Investasi tersebut tidak hanya mempercepat kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam hak atas pangan masyarakat lokal. Alih fungsi lahan produktif menjadi perkebunan monokultur menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan lokal dan membatasi akses perempuan terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan mereka. Perubahan ini menciptakan bentuk penindasan berlapis terhadap perempuan. Sebagai pihak yang sebelumnya berperan penting dalam produksi pangan keluarga, kini mereka kehilangan peran strategisnya dan menjadi lebih bergantung pada bahan pangan dari luar.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat, di mana perempuan semakin tersisih dari proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Selain itu, SP mencatat perubahan orientasi masyarakat terhadap hutan. Dulu, hutan dipandang sebagai sumber kehidupan, pangan, dan obat-obatan alami. Kini, hutan lebih dilihat sebagai aset ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan finansial. Orientasi baru ini lebih didominasi oleh laki-laki yang berfokus pada perluasan lahan dan aktivitas ekonomi, sementara perempuan justru menghadapi risiko sosial dan ekologis yang lebih besar, seperti kehilangan akses terhadap sumber daya dan meningkatnya beban domestik.

SP juga menekankan bahwa perempuan sering kali tidak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai program pemerintah atau kegiatan sosialisasi lingkungan. Waktu pelaksanaan kegiatan sering berbenturan dengan tanggung jawab domestik mereka, sehingga tingkat partisipasi perempuan rendah. Kalaupun hadir, keikutsertaan perempuan kerap bersifat simbolis, tanpa ruang untuk menyampaikan pandangan atau mempengaruhi keputusan. Akibatnya, kebutuhan dan perspektif perempuan jarang terakomodasi dalam kebijakan dan program lingkungan. Sebagai organisasi, SP berfokus pada penguatan kesadaran kritis, peningkatan kapasitas, dan advokasi hak-hak perempuan akar rumput. Mereka bekerja bersama kelompok perempuan petani, buruh, dan masyarakat adat untuk memperjuangkan isu agraria, kedaulatan pangan, serta hak atas lingkungan hidup yang adil.

SP juga memberikan edukasi terkait isu seksualitas dan migrasi aman bagi buruh migran perempuan, dengan tujuan menciptakan tatanan sosial yang lebih setara secara ekonomi, sosial, dan politik. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki peran penting dalam sistem pangan dan pengelolaan lingkungan, ruang partisipasi mereka masih minim. Masuknya investasi besar, perubahan orientasi terhadap hutan, dan lemahnya akses informasi memperdalam kerentanan perempuan. Karena itu, SP menegaskan perlunya kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dan lingkungan, dengan memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di wilayah mereka.

1.5 Tabel Harvard Gender Analytical Framework Terpadu: Analisis Gender dalam Mitigasi Karhutla di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat stakeholder, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Serikat Perempuan Mamut Menteng (SPMM), Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Kereng Bangkirai, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APMPM) Kota Palangka Raya, maka peneliti menyusun Tabel Harvard Gender Analytical Framework Terpadu: Analisis Gender dalam Mitigasi Karhutla di Kota Palangka Raya.

Penyusunan tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pembagian peran, akses, kontrol, serta kebutuhan praktis dan strategis gender dalam proses mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya. Melalui pendekatan ini, dapat terlihat

dengan jelas bagaimana masing-masing lembaga memiliki fokus, peran, dan tingkat sensitivitas gender yang berbeda dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Analisis terpadu ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan peran dan peluang kolaborasi antar-lembaga, khususnya dalam mengintegrasikan aspek teknis dan sosial secara seimbang. Dengan demikian, tabel Harvard Gender Analytical Framework Terpadu diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi mitigasi karhutla yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif gender di masa mendatang.

Tabel Harvard Gender Analytical Framework Terpadu: Analisis Gender dalam Mitigasi Karhutla di Kota Palangka Raya.

Komponen / Aspek	DLH Kota Palangka Raya	Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM)	MPA Kelurahan Kereng Bangkirai	DP3APMPM Kota Palangka Raya	Analisis Sintesis (Kesimpulan)
Aktivitas (Peran)	Fokus pada kegiatan teknis: sosialisasi, penyiraman lahan, edukasi lingkungan, tanpa penegakan hukum langsung.	Fokus pada advokasi, pemberdayaan perempuan, dan edukasi ekologis berbasis komunitas.	Fokus pada patroli, pemadaman, dan sosialisasi pencegahan.	Fokus pada pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, serta edukasi sosial.	Pembagian peran antar lembaga belum terkoordinasi. DLH dan MPA kuat di teknis; SP dan DP3APMPM kuat di sosial dan gender, tapi belum terintegrasi.
Akses terhadap Sumber Daya	Akses terhadap sarana teknis dan pendanaan APBD, tapi kurang akses ke komunitas rentan.	Akses kuat terhadap jaringan sosial dan kelompok perempuan akar rumput.	Akses langsung terhadap sumber daya lapangan (alat, logistik) dari mitra seperti BNF.	Akses administratif terhadap data sosial, layanan dasar, dan program pemberdayaan.	Akses tersebar dan sektoral. Diperlukan integrasi lintas lembaga agar akses teknis dan sosial saling melengkapi.
Kontrol (Pengambilan Keputusan)	Didominasi laki-laki pada level strategis dan lapangan.	Dipimpin perempuan, dengan kontrol tinggi pada isu sosial dan advokasi.	Kontrol sepenuhnya laki-laki; perempuan hanya berperan informal.	Didominasi perempuan, tapi dalam ruang lingkup non-teknis.	Pola kontrol menunjukkan bias gender: laki-laki dominan di strategis dan lapangan, perempuan di sektor non teknis. Keduanya belum bersinggungan dalam kebijakan mitigasi.
Kebutuhan Praktis Gender	Pelatihan lapangan inklusif, fasilitas	Pengakuan formal atas peran sosial-	Dukungan kesehatan, logistik, dan	Rumah aman, bantuan dasar, dan	Kebutuhan praktis perempuan

	kerja aman bagi perempuan.	ekologis perempuan dan akses pada dukungan pascakebakaran.	pelatihan mitigasi ringan bagi perempuan.	pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak terdampak.	belum menjadi bagian kebijakan formal mitigasi karhutla; masih dianggap isu sosial, bukan lingkungan.
Kebutuhan Strategis Gender	Pengarusutamaan gender dalam kebijakan lingkungan daerah dan peningkatan kepemimpinan perempuan.	Keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengakuan hak ekologis.	Eksklusi perempuan dalam struktur MPA dan perencanaan mitigasi komunitas.	Integrasi isu gender dan lingkungan dalam program pemberdayaan keluarga dan perempuan.	Diperlukan strategi bersama lintas sektor yang menempatkan perempuan bukan sekadar penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama mitigasi.
Kendala Utama	Koordinasi lintas sektor lemah; kebijakan masih netral gender.	Keterbatasan sumber daya dan dukungan formal pemerintah.	Struktur organisasi maskulin dan minim panduan inklusif.	Belum terhubung langsung dengan lembaga teknis mitigasi.	Fragmentasi kelembagaan menjadi hambatan utama implementasi mitigasi responsif gender.
Peluang Kolaborasi	Menjadi koordinator teknis lintas lembaga.	Mitra edukatif dan advokatif untuk pendekatan sosial berbasis gender.	Mitra lapangan berbasis komunitas lokal.	Penghubung antara kebijakan sosial dan kebijakan lingkungan.	Kolaborasi keempat lembaga dapat menciptakan model mitigasi karhutla berkeadilan gender dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis melalui *Harvard Gender Analytical Framework* dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik peran dan fokus antar-stakeholder dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki kapasitas yang kuat dalam aspek teknis, seperti pelaksanaan sosialisasi, patroli, serta tindakan langsung di lapangan. Namun, kedua lembaga ini masih menunjukkan kelemahan dalam hal sensitivitas gender. Kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat netral gender dan belum mengakomodasi kebutuhan serta peran spesifik perempuan dan kelompok rentan dalam proses mitigasi.

Sebaliknya, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APMPM) menonjol pada dimensi sosial dan pemberdayaan perempuan. Kedua lembaga ini memiliki kapasitas yang baik dalam memperkuat kesadaran kritis, membangun solidaritas, serta mendorong partisipasi perempuan dalam isu-isu sosial dan ekonomi. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam aspek teknis mitigasi karhutla masih

sangat terbatas, karena kegiatan tersebut umumnya dianggap berada di luar mandat kelembagaan mereka.

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa upaya mitigasi karhutla yang inklusif memerlukan integrasi antara kapasitas teknis dan pemberdayaan sosial. Sinergi antar-lembaga menjadi kunci dalam membangun sistem mitigasi yang kolaboratif dan responsif gender. Pendekatan lintas sektor yang menggabungkan kekuatan DLH dan MPA dalam aspek teknis dengan keunggulan SPMM dan DP3APMPM dalam pemberdayaan perempuan diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat. Melalui integrasi ini, kebijakan mitigasi karhutla di Kota Palangka Raya tidak hanya berorientasi pada pencegahan bencana secara fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan sosial dan kesetaraan gender sebagai bagian dari keberlanjutan lingkungan.

2. Analisis Tapak

2.1 Partisipasi Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Kelurahan Kereng Bangkirai, diketahui bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berasal dari faktor alam, khususnya saat musim kemarau ekstrem yang membuat lahan gambut menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Masyarakat setempat mengingat peristiwa besar pada tahun 1997, 2015, dan 2019, yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi warga. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga menjadi pemicu, seperti kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan oleh nelayan atau pembukaan akses menuju area tangkap ikan dengan cara menebas dan membakar semak, yang kerap menyebabkan api meluas ke lahan sekitar.

Dampak kebakaran sangat dirasakan masyarakat. Kabut asap tebal mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial, serta menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terkena ISPA. Kebakaran juga menyebabkan gagal panen, berkurangnya hasil tangkapan ikan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Aktivitas warga menjadi terbatas akibat jarak pandang pendek dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Dengan demikian, karhutla tidak hanya dianggap sebagai bencana ekologis, tetapi juga ancaman langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kereng Bangkirai. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan kesadaran kolektif dan solidaritas sosial yang kuat.

Pengalaman menghadapi kebakaran membuat mereka tanggap dan saling membantu ketika bencana terjadi. Laki-laki biasanya terjun langsung memadamkan api, sedangkan perempuan membantu menyiapkan air, makanan, dan kebutuhan logistik bagi relawan. Semangat gotong royong ini juga tampak dalam kegiatan rutin seperti pembersihan sungai untuk menjaga kelancaran arus air dan mendukung aktivitas nelayan. Kereng Bangkirai merupakan kawasan strategis yang dekat dengan pusat kota dan memiliki potensi wisata air di Sei Bangau. Kondisi ini menarik perhatian berbagai pihak seperti WWF, Cimtrop, dan BNF untuk berkolaborasi dalam upaya mitigasi karhutla. Kolaborasi ini mempercepat respon terhadap titik api, namun dalam praktiknya masih terlihat pembagian peran berbasis gender.

Laki-laki lebih dominan dalam kegiatan teknis seperti patroli, pemadaman, dan pembuatan sekat kanal, sedangkan perempuan terlibat dalam kegiatan non-teknis seperti sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan ekonomi pendukung. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum, berupa himbauan untuk tidak membakar lahan, tanpa pelatihan teknis pencegahan kebakaran. Meski demikian, insentif sebesar Rp150.000 per hari menjadi daya tarik bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi. WWF turut berperan penting melalui program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan alat tangkap ikan ramah lingkungan, seperti *renggei* dan *tampirai kawat*, agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

Selain itu, karhutla juga memunculkan peluang ekonomi baru. Kegiatan persemaian dan penanaman bibit pohon menjadi sumber penghasilan tambahan dengan keuntungan hingga Rp10 juta per keluarga. Laki-laki bertugas menanam bibit di hutan, sementara perempuan menangani persemaian dan perawatan di rumah. Bibit yang tumbuh dibeli oleh dinas atau lembaga non-pemerintah untuk program reboisasi. Pada musim kemarau, penyewaan klotok

untuk patroli dan pemadaman juga menjadi sumber pendapatan dengan tarif sekitar Rp150.000 per hari. Dalam kegiatan ini, laki-laki menjadi tenaga lapangan, sedangkan perempuan menyiapkan bekal dan logistik. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga tampak melalui kegiatan hortikultura yang diinisiasi PKK dan kelompok perempuan setempat, dengan menanam cabai dan sayuran untuk konsumsi rumah tangga maupun dijual kepada wisatawan. Namun, sebagian besar inisiatif masyarakat masih didorong oleh motif ekonomi ketimbang kesadaran ekologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih cukup jelas. Laki-laki mendominasi aktivitas lapangan dan teknis, sedangkan perempuan berperan dalam kegiatan domestik, sosial, dan ekonomi pendukung seperti UMKM dan persemaian. Dari sekitar 30 kelompok masyarakat yang ada seperti kelompok tani, nelayan, madu kelulut, budidaya ikan, dan jamur kebanyakan anggotanya adalah laki-laki, sementara kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia lebih banyak sebagai penerima manfaat program sosial. Wawancara dengan tiga informan perempuan, yaitu Ibu Duniati (61 tahun), Ibu Meli (32 tahun), dan Ibu Nyai (50 tahun), memperkuat temuan tersebut. Mereka menambahkan bahwa kebakaran juga sering dipicu oleh kelalaian manusia selain faktor alam.

Lahan gambut yang kering membuat api mudah menjalar, sedangkan kebiasaan membuang puntung rokok dan korsleting listrik juga menjadi penyebab. Ada pula warga yang sengaja membakar lahan untuk menyuburkan tanah. Mereka merasakan dampak langsung berupa gangguan pernapasan dan kerugian ekonomi. Tanaman purun milik Ibu Duniati terbakar, sedangkan pendapatan warung milik Ibu Meli dan Ibu Nyai menurun drastis akibat kabut asap yang membuat warga enggan keluar rumah. Meskipun begitu, mereka tetap menunjukkan solidaritas dan saling membantu memadamkan api dengan peralatan sederhana, meski merasa distribusi bantuan dari pemerintah belum merata dan efektif.

Dalam upaya pencegahan, ketiga informan menyebut bahwa pelibatan masyarakat, khususnya perempuan, masih minim. Informasi yang diterima hanya berupa himbauan singkat dari kelurahan atau mobil keliling tanpa pelatihan lanjutan. Padahal, masyarakat memiliki semangat tinggi untuk menjaga lingkungan, tetapi keterbatasan fasilitas dan akses informasi menghambat partisipasi mereka. Masyarakat juga menerapkan sanksi sosial bagi pelaku pembakaran sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

2.2 Tabel Harvard Framework Analisis Gender dalam Mitigasi Karhutla Tingkat Tapak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya

Penyusunan Tabel Harvard Framework Analisis Gender dalam Mitigasi Karhutla Tingkat Tapak di Kelurahan Kereng Bangkirai bertujuan untuk memetakan secara komprehensif dinamika peran, akses, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi sejauh mana kesetaraan gender telah terintegrasi dalam praktik mitigasi di tingkat komunitas, serta menilai potensi dan hambatan partisipasi kelompok perempuan dalam sistem pengelolaan lingkungan.

Harvard Framework Analisis Gender dalam Mitigasi Karhutla Tingkat Tapak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya

No	Komponen Analisis	Laki-laki	Perempuan	Implikasi terhadap Kebijakan Mitigasi Karhutla
1	Aktivitas Produktif	✓ Terlibat langsung dalam kegiatan teknis mitigasi, seperti patroli api, pembuatan sekat kanal, pemadaman kebakaran, serta penyewaan klotok untuk patroli dan transportasi alat.	✓ Terlibat dalam aktivitas non-teknis, seperti persemaian bibit, perawatan tanaman, pembuatan pupuk organik dan teh herbal, serta kegiatan ekonomi rumah tangga (UMKM).	✓ Kebijakan perlu memperluas pelatihan teknis bagi perempuan agar peran mereka tidak terbatas pada aktivitas domestik, serta memastikan akses terhadap



		✓ Mengelola lahan pertanian dan penangkapan ikan di sekitar lahan gambut.	✓ Menyiapkan logistik dan makanan bagi petugas lapangan.	program produktif pasca kebakaran.
2	Aktivitas Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membantu dalam logistik pemadaman dan pembuatan sarana darurat. ✓ Kadang ikut mengatur mobilisasi anggota keluarga saat bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memikul beban utama dalam mengurus anak, lansia, dan menyediakan kebutuhan dasar rumah tangga selama dan setelah kebakaran. ✓ Mengatur penggunaan air dan bahan pangan yang terbatas. 	✓ Kebijakan mitigasi harus memperhatikan beban ganda perempuan, dengan menyediakan dukungan sosial seperti bantuan pangan, kesehatan, dan ruang ramah perempuan dan anak.
3	Aktivitas Sosial dan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjadi anggota kelompok tani, nelayan, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). ✓ Terlibat dalam kegiatan reboisasi dan patroli hutan bersama dinas/LSM. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktif dalam kelompok PKK, kegiatan hortikultura, dan kelompok perempuan desa. ✓ Berperan penting dalam menjaga solidaritas sosial dan gotong royong. 	✓ Keterlibatan perempuan perlu diintegrasikan dalam forum formal pengambilan keputusan lingkungan agar suara mereka diakomodasi secara substantif, bukan sekadar formalitas.
4	Akses terhadap Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki akses lebih besar terhadap lahan, alat kerja, kendaraan, dan informasi dari pemerintah/LSM. ✓ Mendapat peluang lebih banyak dalam kegiatan yang berinsentif (patroli, pemadaman). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatas akses terhadap pelatihan teknis, modal, dan informasi kebijakan lingkungan. ✓ Akses perempuan sering diperoleh melalui kelompok informal (PKK, koperasi). 	✓ Pemerintah dan mitra harus menjamin akses yang setara terhadap sumber daya, pelatihan, dan bantuan ekonomi bagi perempuan agar peran mereka dalam mitigasi meningkat.
5	Kontrol terhadap Sumber Daya dan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendominasi keputusan rumah tangga dan komunitas terkait penggunaan lahan serta pengambilan kebijakan lokal. ✓ Mengelola hasil produksi pertanian dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak memiliki kontrol penuh terhadap hasil ekonomi keluarga dan kebijakan lingkungan. ✓ Partisipasi perempuan sering bersifat simbolik atau terbatas pada pelaksanaan, bukan perencanaan. 	✓ Diperlukan kebijakan afirmatif yang memberi ruang bagi perempuan dalam kepemimpinan komunitas dan pengambilan keputusan publik.
6	Kebutuhan Praktis Gender	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatihan teknis mitigasi (pemadaman, sekat kanal, perawatan alat). ✓ Dukungan logistik dan alat kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Akses terhadap pelatihan pencegahan kebakaran, fasilitas kesehatan, dan bantuan ekonomi pascakebakaran. ✓ Perlindungan terhadap dampak kesehatan akibat kabut asap. 	✓ Pemenuhan kebutuhan praktis akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan partisipasi kedua gender dalam mitigasi karhutla.

7	Kebutuhan Strategis Gender	✓ Peningkatan kapasitas kepemimpinan lokal dan kesadaran akan keadilan gender dalam kebijakan lingkungan.	✓ Pengakuan atas peran dan kontribusi perempuan dalam mitigasi bencana serta akses penuh dalam perencanaan dan evaluasi program.	✓ Integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan daerah (DLH, DP3APMPM, kelurahan) untuk mewujudkan mitigasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
---	----------------------------	---	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola pembagian kerja berbasis gender yang masih kuat di Kelurahan Kereng Bangkirai. Laki-laki cenderung mendominasi aktivitas teknis dan pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam kegiatan domestik dan sosial-komunitas. Meski begitu, perempuan memiliki kontribusi penting dalam menjaga ketahanan sosial, menyediakan logistik, serta menginisiasi kegiatan ekonomi pasca-kebakaran seperti persemaian dan hortikultura. Namun, akses dan kontrol terhadap sumber daya masih timpang. Laki-laki memiliki akses lebih besar terhadap lahan, informasi, dan peluang ekonomi, sementara perempuan lebih bergantung pada kelompok informal dan jarang terlibat dalam proses perencanaan formal. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan mitigasi karhutla belum sepenuhnya responsif gender. Melalui penerapan Model Harvard Gender Framework, pemerintah dapat mengidentifikasi secara sistematis kesenjangan akses, peran, dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

3. Pengembangan Model Harvard Gender sebagai Strategi Penguatan Kebijakan Mitigasi Karhutla dan Keberlanjutan Lingkungan yang Inklusif

Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan dan program mitigasi selama ini masih didominasi oleh perspektif teknokratis yaitu berfokus pada aspek fisik dan penanganan teknis tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan gender secara memadai. Padahal, pengalaman dan kontribusi perempuan dalam menjaga ketahanan sosial-ekologis di tingkat komunitas memiliki potensi besar untuk memperkuat efektivitas kebijakan mitigasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki kapasitas kuat dalam aspek teknis, seperti pelaksanaan patroli, pemadaman, dan sosialisasi di lapangan. Namun, kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat netral gender dan belum mengakomodasi kebutuhan serta peran spesifik perempuan dan kelompok rentan dalam proses mitigasi.

Sebaliknya, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APMPM) memiliki kekuatan pada aspek sosial dan pemberdayaan perempuan. Keduanya berperan penting dalam memperkuat kesadaran kritis masyarakat, membangun solidaritas sosial, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial komunitas. Namun, keterlibatan mereka dalam aktivitas teknis mitigasi karhutla masih terbatas karena belum menjadi mandat utama kelembagaan.

Sementara itu, Pada tingkat tapak, hasil analisis menunjukkan bahwa di Kelurahan Kereng Bangkirai, terdapat pola pembagian kerja berbasis gender yang masih kuat. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam aktivitas teknis seperti pemadaman dan pembuatan sekat kanal, sementara perempuan berperan dalam kegiatan domestik, sosial, serta ekonomi pasca-bencana seperti persemaian, hortikultura, dan penyediaan logistik. Meskipun peran perempuan tidak selalu terlihat dalam struktur formal, kontribusi mereka sangat penting dalam menjaga ketahanan sosial dan keberlanjutan ekonomi keluarga. Kemudian di tingkat tapak, masih terdapat kesenjangan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Laki-laki umumnya memiliki akses lebih besar terhadap lahan, informasi, dan peluang ekonomi, sedangkan perempuan lebih bergantung pada jaringan informal dan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi karhutla di tingkat lokal belum sepenuhnya responsif gender.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan Model Harvard Gender sebagai kerangka koordinatif yang menjembatani antara tingkat Stakeholder yang berfokus pada aspek kebijakan, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan lintas instansi dan tingkat Tapak yang Berfokus pada dinamika sosial-ekologis dan pembagian kerja berbasis gender di tingkat komunitas lokal.

Tabel. Model Harvard Gender dalam Mitigasi Karhutla Dari Tingkat Stakeholder hingga Tapak

Level Analisis	Aspek Harvard Framework	Deskripsi Peran dan Temuan Utama	Implikasi Strategis
Tingkat Stakeholder	Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya	DLH dan MPA memiliki akses kuat terhadap sumber daya teknis (peralatan, dana, jaringan pemerintah), tetapi perempuan dan kelompok rentan belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.	Perlu integrasi gender dalam kebijakan, mekanisme koordinasi lintas instansi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar responsif terhadap peran dan kebutuhan perempuan.
	Aktivitas dan Peran Gender	Laki-laki dominan dalam kegiatan teknis seperti patroli dan pemadaman; perempuan lebih aktif di bidang pemberdayaan sosial melalui SPMM dan DP3APMPM.	Sinergikan aktivitas teknis dan sosial agar pemberdayaan perempuan menjadi bagian integral dari mitigasi karhutla.
	Akses terhadap Informasi dan Partisipasi dalam Kebijakan	Informasi dan pelatihan mitigasi lebih banyak ditujukan kepada kelompok laki-laki dan aparat teknis.	Perlu mekanisme pelibatan perempuan dalam proses kebijakan dan perencanaan program mitigasi berbasis komunitas.
	Kelembagaan dan Koordinasi	DLH dan MPA berfokus pada teknis; SPMM dan DP3APMPM berfokus pada sosial dan pemberdayaan.	Integrasi lintas lembaga penting untuk mewujudkan mitigasi yang kolaboratif, inklusif, dan responsif gender.
Tingkat Tapak	Pembagian Kerja Berdasarkan Gender	Laki-laki bertanggung jawab atas kegiatan teknis (pemadaman, sekat kanal); perempuan berperan dalam logistik, persemaian, hortikultura, dan dukungan sosial.	Kegiatan mitigasi perlu mengakui dan memperkuat peran domestik serta sosial perempuan sebagai bagian dari strategi adaptif lokal.
	Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi dan Alam	Laki-laki memiliki kontrol lebih besar terhadap lahan dan sumber daya ekonomi; perempuan bergantung pada jaringan informal dan hasil usaha mikro.	Perlu program pemberdayaan ekonomi perempuan yang terhubung langsung dengan kegiatan lingkungan dan mitigasi karhutla.
	Partisipasi dan Pengambilan Keputusan	Perempuan jarang dilibatkan dalam rapat formal atau struktur kelembagaan masyarakat peduli api.	Diperlukan mekanisme inklusif seperti kelompok perempuan lingkungan atau forum partisipatif desa.

	Kearifan Lokal dan Ketahanan Sosial	Gotong royong dan solidaritas sosial masih kuat, menjadi modal sosial penting dalam menghadapi bencana.	Kebijakan mitigasi perlu mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai gotong royong sebagai basis adaptasi berbasis komunitas.
Integrasi Stakeholder dan Tapak	Sinkronisasi Stakeholder dan Tapak	Kekuatan teknis stakeholder digabung dengan kekuatan sosial komunitas; koordinasi berjalan dua arah (top-down dan bottom-up).	Mendorong model mitigasi yang holistik dan berkelanjutan, di mana kebijakan responsif gender dijalankan melalui praktik lapangan yang partisipatif.

Model ini menunjukkan bahwa efektivitas mitigasi karhutla tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dalam pengendalian api, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan dan praktik di lapangan mampu mengakomodasi peran, pengalaman, dan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Integrasi antara level stakeholder dan tapak menjadi elemen penting karena menjamin adanya kesinambungan antara arah kebijakan (top-down) dan realitas sosial-ekologis di lapangan (bottom-up). Dengan demikian, Model Harvard Gender Terpadu tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai *framework implementatif* yang menghubungkan dimensi kebijakan, kelembagaan, dan komunitas.

Pendekatan ini membuka peluang terciptanya sistem mitigasi karhutla yang lebih adil, kolaboratif, dan berorientasi pada ketahanan sosial-ekologis. Dalam konteks Kota Palangka Raya, penerapan model ini dapat memperkuat ekosistem tata kelola kebakaran yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga inklusif secara sosial, memastikan bahwa perempuan, laki-laki, dan seluruh kelompok masyarakat memiliki peran dan manfaat yang setara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Analisis teori demokrasi agonistik oleh Chantal Mouffe.

Diskusi ini menggunakan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe untuk membaca kembali temuan penelitian yang telah dianalisis melalui Harvard Gender Analytical Framework. Pendekatan agonistik memungkinkan peneliti untuk melampaui pembacaan teknokratis dan deskriptif, dengan menempatkan kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai arena politik yang sarat dengan relasi kuasa, konflik kepentingan, dan praktik eksklusi. Dalam perspektif Mouffe, kebijakan publik tidak pernah bersifat netral. Setiap kebijakan merupakan hasil dari konstruksi hegemonik yang membuat cara pandang tertentu menjadi dominan dan diterima sebagai kebenaran umum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mitigasi karhutla di Kota Palangka Raya masih didominasi oleh wacana teknokratis yang menekankan aspek pemadaman, patroli, dan pengendalian fisik api. Wacana ini diinstitusionalisasikan melalui lembaga-lembaga teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Peduli Api, yang sebagian besar didominasi oleh aktor laki-laki dan pendekatan maskulin dalam pengelolaan bencana.

Dominasi wacana teknis tersebut membentuk hegemoni tertentu dalam tata kelola karhutla, di mana pengetahuan lapangan, pengalaman sosial, dan perspektif gender diposisikan sebagai isu sekunder atau bahkan non-relevan. Perempuan dan kelompok rentan lebih sering dipandang sebagai kelompok terdampak yang membutuhkan bantuan logistik, bukan sebagai subjek politik yang memiliki kapasitas untuk mendefinisikan risiko, kerentanan, dan strategi mitigasi. Dalam istilah Mouffe, kondisi ini menunjukkan bagaimana konsensus teknokratis bekerja sebagai mekanisme eksklusi politik.

Analisis agonistik membantu menjelaskan mengapa partisipasi perempuan dalam mitigasi karhutla cenderung bersifat simbolik. Kehadiran perempuan dalam sosialisasi atau kegiatan pendukung tidak secara otomatis mengubah relasi kuasa, karena arena pengambilan keputusan strategis tetap dikuasai oleh aktor-aktor tertentu. Konsensus yang dibangun atas nama koordinasi

lintas sektor justru menutupi konflik kepentingan antara rasionalitas teknis negara dan klaim keadilan sosial-ekologis yang diperjuangkan oleh organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Perempuan Mamut Menteng.

Dari sudut pandang demokrasi agonistik, perbedaan orientasi antara lembaga teknis negara dan organisasi perempuan tidak seharusnya dipahami sebagai hambatan implementasi kebijakan. Sebaliknya, perbedaan ini merupakan ekspresi politik yang sah dan perlu diartikulasikan secara terbuka. Upaya untuk menyatukan seluruh aktor dalam satu kerangka konsensus justru berisiko mereduksi tuntutan perempuan dan kelompok rentan menjadi sekadar isu partisipasi, tanpa menyentuh akar ketimpangan struktural.

Pada tingkat tapak, hasil penelitian menunjukkan pembagian kerja berbasis gender yang kuat, di mana laki-laki mendominasi aktivitas teknis mitigasi, sementara perempuan menjalankan peran domestik, sosial, dan ekonomi pendukung. Demokrasi agonistik memungkinkan pembacaan bahwa pembagian ini bukan semata akibat preferensi individual atau keterbatasan kapasitas, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan institusional yang menormalisasi eksklusi perempuan dari ruang-ruang teknis dan kepemimpinan komunitas.

Dalam kerangka Mouffe, transformasi kebijakan mitigasi karhutla tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan kapasitas atau pelatihan teknis bagi perempuan. Yang lebih fundamental adalah pembukaan arena politik baru di tingkat lokal, di mana perempuan dapat mengartikulasikan kepentingan dan pengalaman mereka sebagai klaim politik yang sah. Ini berarti menggeser pendekatan partisipasi dari sekadar kehadiran dalam forum menjadi pengakuan atas konflik dan perbedaan kepentingan dalam tata kelola lingkungan.

Integrasi Harvard Gender Framework dengan demokrasi agonistik Mouffe menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Harvard Framework berfungsi untuk mengidentifikasi secara sistematis kesenjangan peran, akses, dan kontrol, sementara demokrasi agonistik menjelaskan mengapa kesenjangan tersebut terus direproduksi melalui praktik hegemonik kebijakan. Dengan demikian, model yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga politis, karena menantang wacana dominan tentang mitigasi karhutla yang selama ini dianggap netral dan teknis.

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya pergeseran paradigma kebijakan mitigasi karhutla menuju pendekatan yang mengakui konflik sebagai bagian dari demokrasi. Pemerintah daerah dan aktor terkait perlu menciptakan mekanisme kebijakan yang memungkinkan artikulasi klaim perempuan dan kelompok rentan tanpa harus dilebur dalam konsensus semu. Dengan cara ini, mitigasi karhutla dapat diarahkan tidak hanya pada pengendalian bencana, tetapi juga pada transformasi relasi kuasa menuju keadilan sosial dan gender yang lebih substantif.

Secara keseluruhan, penggunaan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe memperkuat posisi penelitian ini dalam tradisi sosiologi politik dan studi kebijakan kritis. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi karhutla tidak semata diukur dari penurunan jumlah kebakaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut membuka ruang demokratis bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk menjadi aktor politik dalam pengelolaan lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya masih didominasi oleh pendekatan teknokratis yang berfokus pada aspek fisik dan penanganan teknis kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Peduli Api memiliki kapasitas kuat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di lapangan, namun kebijakan dan program yang dijalankan cenderung bersifat netral gender dan belum secara sistematis mengakomodasi kebutuhan serta peran spesifik perempuan dan kelompok rentan.

Melalui penerapan Harvard Gender Analytical Framework, penelitian ini berhasil memetakan pembagian peran, akses, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan baik di tingkat stakeholder maupun di tingkat tapak. Hasil analisis menunjukkan adanya pembagian kerja berbasis gender yang masih kuat, di mana laki-laki mendominasi aktivitas teknis dan



pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam aktivitas domestik, sosial, dan ekonomi pendukung. Kontribusi perempuan dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi pascabencana terbukti signifikan, namun belum diakui secara formal dalam struktur kebijakan mitigasi.

Integrasi Harvard Gender Framework dengan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe memperlihatkan bahwa kesenjangan gender dalam mitigasi karhutla bukan semata-mata persoalan kurangnya partisipasi atau kapasitas perempuan, melainkan hasil dari relasi kuasa dan praktik hegemonik dalam tata kelola kebijakan lingkungan. Pendekatan teknokratis yang dominan telah membatasi ruang artikulasi politik perempuan dan kelompok rentan, sehingga partisipasi mereka cenderung bersifat simbolik dan tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan strategis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mitigasi karhutla yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara kapasitas teknis, pemberdayaan sosial, dan pengakuan atas konflik kepentingan sebagai bagian dari proses demokratis. Model Harvard Gender Terpadu yang dikembangkan dalam penelitian ini berpotensi menjadi kerangka implementatif untuk menjembatani kebijakan di tingkat stakeholder dengan realitas sosial-ekologis di tingkat tapak, sehingga mitigasi karhutla dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pertama, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan perspektif gender secara substantif ke dalam kebijakan dan program mitigasi karhutla, tidak hanya melalui bahasa kebijakan yang netral gender, tetapi dengan mekanisme afirmatif yang memastikan keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program mitigasi.

Kedua, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor antara lembaga teknis lingkungan, lembaga pemberdayaan perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini penting untuk menggabungkan pendekatan teknis dan sosial sehingga mitigasi karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat.

Ketiga, di tingkat tapak, perlu dibuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan melalui forum desa, kelompok perempuan lingkungan, atau mekanisme partisipatif lainnya. Ruang ini harus memungkinkan perempuan mengartikulasikan pengalaman dan kepentingannya sebagai klaim politik yang sah, bukan sekadar sebagai penerima manfaat program.

Keempat, kebijakan mitigasi karhutla perlu mengakui dan memanfaatkan pengetahuan lokal serta praktik sosial yang telah dijalankan masyarakat, termasuk kontribusi perempuan dalam menjaga ketahanan pangan, ekonomi, dan solidaritas sosial. Pengakuan ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan keberlanjutan program mitigasi.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi longitudinal dan melibatkan aktor ekonomi berskala besar guna memperdalam analisis relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan kapital dalam tata kelola kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang transformasi kebijakan lingkungan yang berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. R., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 173–181. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.34698>
- Desa, U.-U. (UU) tentang. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.
- Global Disability Innovation Hub. (2022). *Desain Inklusif dan Aksesibilitas Lingkungan Binaan di Solo, Indonesia*. www.AT2030.org
- Kemenkeu; NDA GCF; GGGI. (2021). *Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial*



- dalam Proyek Perubahan Iklim.*
- Mouffe, C. (2000). *The Democratic Paradox*. London: Verso.
- Mouffe, C. (2005). *On the Political*. London: Routledge.
- Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking the World Politically*. London: Verso.
- Pantau Gambut. (2023). *Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Tahun 2023*.
- Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Pedoman Penilaian Desa Siaga Api*.
- Sani, R. R. et. all. (2022). MODUL DAN BAHAN AJAR : Analisis Gender Bidang Penegakan Hukum. In *Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Suryadinata, Theofilus Apolinarius. 2017. Artikulasi Politik Kewarganegaraan Dalam Gerakan Keadilan Lingkungan di Kalimantan Tengah. Tesis : UGM
- UN Women; UNFPA; UNDR. (2021). *BEYOND VULNERABILITY TO GENDER EQUALITY AND WOMEN'S EMPOWERMENT AND LEADERSHIP IN DISASTER RISK REDUCTION: Critical Actions for the United Nations System*.
- Undang-undang (UU) TENTANG Pemerintahan Daerah. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- UNDR. (2023). *Accelerating Action on Gender equality in disaster risk reduction by 2030*.
- WWF INDONESIA; PPIG UNIVERSITAS PALANGKA RAYA. (2024). *Kajian Tata Kelola Kebakaran Hutan di KHG Sebangau – Katingan dan KHG Sebangau - Kahayan Dari Level Provinsi Hingga Tapak Dalam Tindakan Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pembelajaran Bersama*.